

Judul : Solusi Konflik Hamas Israel : PBB Kudu Hentikan Perang
Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Solusi Konflik Hamas-Israel

PBB Kudu Hentikan Perang

Senayan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera mengambil langkah taktis untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Gaza, Palestina. DPR juga meminta PBB menghentikan kekerasan dan perang Hamas-Israel.

KETUA Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan, konflik Hamas-Israel telah menelan korban ribuan orang. Dikhawatirkan, warga kita di Gaza terancam keselamatan jiwanya.

"Evakuasi WNI di Gaza dan semaksimal mungkin jaga keamanan WNI di kawasan konflik, tidak hanya di Gaza tetapi juga Tepi Barat," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Meutya ingin negara hadir menjamin keselamatan setiap warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri, maupun yang berada di luar. Termasuk WNI yang kini terjebak dalam konflik antara pejuang kemerdekaan Hamas Palestina melawan Israel.

"Ini sesuai dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'," ucap politisi perempuan Partai Golkar ini.

Meutya terus memonitor perkembangan perang di Gaza, Palestina, awal Oktober 2023 yang telah menelan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Korban terbanyak merupakan warga Gaza, Palestina.

"Kami memandang konflik saat ini tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak tahun 1948, yaitu direbutnya wilayah Palestina oleh Israel. Ditambah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun," jelasnya.

Untuk itu, Komisi I DPR meminta semua pihak yang berkonflik menghentikan segala bentuk provokasi dan mulai memikirkan jalur dialog dan solusi jangka pendek serta jangka panjang.

Solusi jangka pendek tersebut, di antaranya menghentikan segala bentuk kekerasan baik oleh Israel dan Hamas.



Meutya Viada Hafid

Komisi I DPR juga mendesak seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Iran mewujudkan perdamaian yang berbentuk solusi jangka panjang *two-state solution*.

"Yaitu terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," tegas Meutya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) dapat berperan lebih aktif memulai proses dialog dan menghentikan perang. Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini.

"PBB pun harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral," sebutnya.

Terakhir, pihaknya juga mengingatkan agar Pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh pada amanah Konstitusi. Yakni, menentang berbagai bentuk penjajahan di muka bumi dan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid prihatin atas terus berlanjutnya penjajahan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

Korbannya, ribuan warga sipil, tempat ibadah (masjid) dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Karena itu, dia mendesak Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif menyelesaikan akar masalah antara Israel dengan Palestina.

"Kehadiran Indonesia penting jadi motor kolaborasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun negara-negara yang membela bangsa Palestina

dari kejahatan perang Israel. Seperti Rusia, China, Venezuela, Turki, Iran, Malaysia, Korea Utara, Afrika Selatan, bahkan juga Arab Saudi," ujarnya.

Kejahatan perang yang dilancarkan Israel atas Palestina/Gaza, lanjutnya, kian menjauhkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian di sana. Juga telah dan terus menimbulkan banyak sekali korban dari warga sipil, termasuk lansia, ibu dan anak-anak, bahkan fasilitas sipil seperti Masjid dan Rumah Sakit Indonesia.

Hidayat menilai, normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang dilakukan oleh beberapa negara akhir-akhir ini, ternyata tidak menimbulkan dampak positif berakhirnya konflik dengan berhentinya penjajahan Israel.

Belum lagi tindakan apartheid dan agresi militer yang mengarah kepada Genosida dan pelanggaran hukum humaniter (hukum perang) dengan penggunaan amunisi fosfor.

Bahkan, Israel juga melanggar ketentuan organ PBB seperti UNESCO yang telah menerbitkan resolusi terkait kompleks Masjid Al Aqsa tapi diabaikan dan dilawan oleh Israel. ■ KAL